

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Tuhan dalam menciptakan manusia dibekali akal dan nafsu yang dapat membedakan satu sama lain. Potensi diri akan timbul setelah permasalahan yang telah terjadi, cenderung untuk memperbaiki diri mencapai kesempurnaan. Bakat termasuk potensi diri yang sudah ada sejak lahir dapat ditemukan pada ciri – ciri fisik ataupun perilaku . kemampuan juga selalu ada pada individu tergantung tingkat kesanggupan melakukannya. Perbedaan bakat dan kemampuan pasti terjadi manakala antara manusia sedang bekerja dalam organisasi (Negara). Siapa saja yang sudah memiliki keuatan secara bakat maupun kemampuan mereka berharap mencapai kesempurnaan diri.

Demokrasi adalah paham pembagian asas antara kedaulatan rakyat dan pemerintah “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”, entitas tertinggi dalam menjalankan sistem pemerintahan dengan tujuan kesejahteraan bersama. Tujuannya adalah dengan bagaimana menggapai kedaulatan rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat.

Paham kedaulatan rakyat adalah termasuk paham yang paling mampu untuk menggerakkan daya juang rakyat yang mau bebas. Seruannya bergema sampai keindonesia yang memperjuangkan kemerdekaan atas nama kedaulatan rakyat. Begitu pula paham republik, yaitu bahwa Negara adalah urusan umum, menjadi cita-cita demokrasi modern dan tetap menghalang usaha pelbagai elite ideologis dan tekhokratis untuk menganggap Negara sebagai urusan mereka yang eksklusif.

Rakyat memeberikan mandat dan hak-haknya melalui pactum subjectionis kepada penguasa atau pemerintah, selama pemerintah masih tunduk pada Undang-undang dasar negara. Oleh karenanya agar dapat mencipatakan kekuasaan yang tidak korup, maka diperlukan sebuah mekanisme check and balance.

Menjadi tuntutan masyarakat sebagai kebutuhan dalam hidup akan dituangkan kedalam peraturan kebijakan pemerintahan. Pemerintah yang mengurus dan mengatur kebijakan tersebut diberikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan masyarakat banyak terdapat dalam aturan-aturan yang bersifat memaksa dan mengikat sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan atau Negara. Pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan tidak akan berjalan begitu saja tanpa adanya hambatan-hambatan. Peran pemerintah sebagai problem solver bagi masyarakatnya harus mengetahui hambatan apa saja yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.

Kalau kita membaca Aristoteles, Plato, lalu Hegel, negara itu memiliki fungsi yang sangat mulia, yang memanggul tujuan mulia memajukan rakyat. Nah, orang liberal melihat negara gagal memajukan rakyat., yang terjadi malah keterbelakangan, kebodohan, kezaliman. Orang liberal berpendapat bahwa sumber kezaliman rakyat adalah negara. Padahal para penganut state of nature melihat negara sebetulnya adalah penyelamat rakyat dari kehancuran dalam state of nature. Negara punya legitimasi, kekuasaan, sarana, tapi ternyata malah menghancurkan diri negara sendiri. Negara benar-benar menjadi 'leviathan' nya Hobbes.

Indonesia mengenal paham demokrasi bisa dikatakan pertama kali dibawah oleh para bangsa kolonial pada masa penjajahan, setelah itu diperkenalkan kembali oleh para intelektual dan pendiri Negara ini. perjalanan demokrasi di Indonesia pun

mengalami banyak pasang surut dan tantangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, akan tetapi dengan bergantinya zaman dan roda pemerintahan demokrasi di bangsa ini mengalami pula beberapa kali perombakan dan tidak keluar dari esensinya.

Berbicara tentang konsep The Kontrak Social yang digagas oleh filsuf Jhon Locke dan ditambahkan oleh Montesquie dengan asas pembagian kekuasaan yang sampai sekarang banyak digunakan di beberapa Negara, tidak menutup kemungkinan pula di beberapa daerah di Indonesia pada umumnya dan khususnya Bolaang Mongondow, lahir sebuah Kontrak Sosial antara raja (pemerintah) dan rakyat yang dikenal dengan *dodandian paloko kinalang*.

Corak Politik apa yang berkembang sejak awal di Bolaang Mongondow. Mulai dari politik nilai zaman persekutuan kampung. Dizaman Raja Tadohe/Sadohe, era tata negara awal dalam pengaturan lebih luas berhasil dibangun. Di *Tudu' in Bakid* (kini Pontodon), kontrak sosial politik antara *Paloko* (warga, rakyat, masyarakat) dengan *Kinalang* (pemimpin, pemerintah) disepakati bentuk "demokrasi khas" yang berlaku atas semua pihak. Saat bersentuhan dengan tradisi Eropa, sekolah modern dan birokrasi kolonial lahir dari proyek sekolah politik etis.

Berbicara *dodandian* maka tidak lepas dengan kepentingan antara raja (pemerintah) dan rakyat, dalam sistem pemerintahan sinergitas antara yang memerintah dan diperintah harusnya bersinergi demi mencapai kepentingan bersama dan tidak tumpang tindih. *Dodandian paloko kinalang* merupakan konsensus politik terbesar yang pernah dilaksanakan oleh para perintis untuk mencapai kesepakatan

bersama dan diikat dengan *odi-odi* (sumpah) sebagai pakta integritas antara pemimpin dan rakyat.

4.2 Saran

Dinamika perjalanan sistem pemerintahan yang terbalut dengan *dodandian paloko kinalang* masih banyak menuai kontroversi pada pemerintahan dewasa ini. Segelintir orang menginginkan agar *dodandian* ini dilaksanakan kembali agar menjadi kontrol antara pemerintah dan rakyat dan dilain pihak masih mempertimbangkannya dengan alasan agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan kepentingan bersama. Nah, orang-orang inilah tidak melihat secara objektif tentang makna dan fungsi *dodandia* itu sendiri sebagai warisan leluhur yang harus tetap dijaga, dipertahankan dan disesuaikan dengan konteks kekinian.

Dodandian yang menyimpan banyak makna akan sebuah sistem telah terlupakan disebabkan kepentingan segelintir orang dalam pemerintahan. Banyak intrik untuk mencapai kekuasaan, jalan salah satunya adalah melupakan harta warisan leluhur ini.

Apabila harta warisan ini tidak diselamatkan maka roda pemerintahan akan tetap bergerak spiral, stagnan dan tidak mencapai tujuan bersama. Pemerintah dengan tetap sebagai pemimpin yang tidak di kontrol oleh sebuah pakta integritas maka akan memperlebar jurang perbedaan dengan rakyat, dan sebaliknya rakyat akan selalu menjadi tuan tanah yang tak perlu diperhatikan. Janji politik akan tetap menjadi janji politik dan pemerintahan akan tetap menjalankan roda pemerintahannya tanpa melihat rakyat sebagai komponen terbesar yang harus diperhatikan.

Penulisan skripsi jika ada yang salah, maka mohon petunjuk dan bimbingannya demi penyempurnaan skripsi ini.